

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 7 / Nomor 1 / Tahun 2019 / Hal. 1 - 110

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANDUNG BARAT CA'ANG BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Albert Januar Christian, dkk

ANALISIS *POLICY NETWORKS*: UTILITAS DAN LIMITASI

Auradian Marta dan Leo Agustino

**KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA CIMAHI**

Fajri Miftahuddin, dkk

**MENALAR DILEMA AKTOR DAN MODEL KERJASAMA DALAM
KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA**

Hanantyo Sri Nugroho

**INOVASI PEMERINTAH DESA DLINGO DALAM MEWUJUDKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA MART TAHUN 2017**

Indah Putri Rengganis dan Muhammad Eko Atmojo

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI
DESA SAYANG KABUPATEN SUMEDANG**

Indra Gunawan Wibiksana

JURNAL AGREGASI: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan dua kali setahun pada Bulan Mei dan Nopember oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal Agregasi memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

KETUA EDITOR

Dewi Kurniasih, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom
(Scopus ID: [57199685060](#), Orcid ID: [0000-0002-4921-2093](#), [Google Scholar](#) , Sinta ID: [259139](#))

ANGGOTA

1. Nia Karniawati, Universitas Komputer Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [259065](#))
2. Nuning Kurniasih, Universitas Padjadjaran, Indonesia
(Scopus ID: [57200989264](#), [Google Scholar](#))
3. Ahmad Harakan, Unismuh Makassar, Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [186789](#))
4. Rino Adibowo, Universitas Komputer Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [6035483](#))
5. Tatik Rohmawati, Universitas Komputer Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [258739](#))
6. Tatik Fidowaty, Universitas Komputer Indonesia
([Google Scholar](#), Sinta ID: [6098702](#))
7. Arif Zainudin, UPS, Tegal
(Scopus ID: [345232017450](#), [Google Scholar](#))

SEKRETARIS EDITOR

Lala Lasmawati, Universitas Komputer Indonesia

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom
Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132
Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Reviewer

1. Achmad Nurmandi (Scopus ID: [35731998300](#), [Google Scholar](#)), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
2. Kittisak Jermsittiparsert (Scopus ID: [55541914700](#), [Google Scholar](#)) Social Research Institute, Chulalongkorn University, Thailand
3. Halimah Abdul Manaf (Scopus ID: [55565189500](#), [Google Scholar](#)), Universiti Utara Malaysia
4. Caroline Paskarina (Scopus ID: [57203370098](#), [Google Scholar](#)), Universitas Padjadjaran, Indonesia
5. Poni Sukaesih Kurniati (Scopus ID: [57204176027](#), [Google Scholar](#)), Universitas Komputer Indonesia
6. Melly Maulin P (Scopus ID: [57193851449](#), [Google Scholar](#)), Universitas Komputer Indonesia
7. Cecep Darmawan (Scopus ID: [56976350500](#), [Google Scholar](#)), Universitas Pendidikan Indonesia
8. Abdul Hamid (Scopus ID: [56441004700](#), [Google Scholar](#)), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmat-Nya, Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 yang dikelola Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dapat kami terbitkan. Jurnal ini berisi karya ilmiah dari para dosen, peneliti, pakar, praktisi dan mahasiswa khususnya di bidang pemerintahan.

Jurnal Agregasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 ini memuat enam naskah. Naskah tersebut telah melalui *double blind review*. Mulai terbitan kali ini, kami sudah menerapkan full OJS (*Open Journal System*). Setiap naskah telah melalui *similarity check* menggunakan Turnitin.

Kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan naskah ilmiahnya kepada kami. Besar harapan kami, Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi ini dapat Terakreditasi Nasional dan memberikan banyak manfaat kepada kita semua.

Bandung, Mei 2019

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANDUNG BARAT CA'ANG BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Albert Januar Christian, dkk	1 – 24
ANALISIS <i>POLICY NETWORKS</i> : UTILITAS DAN LIMITASI Auradian Marta dan Leo Agustino	25- 41
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA CIMAHI Fajri Miftahuddin, dkk	42 – 60
MENALAR DILEMA AKTOR DAN MODEL KERJASAMA DALAM KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA Hanantyo Sri Nugroho	61 – 78
INOVASI PEMERINTAH DESA DLINGO DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA MART TAHUN 2017 Indah Putri Rengganis dan Muhammad Eko Atmojo	79 – 90
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI DESA SAYANG KABUPATEN SUMEDANG Indra Gunawan Wibiksana	91 – 110

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANDUNG BARAT CA'ANG BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Albert Januar Christian ¹⁾, Ayatul Fauzy Mubaroq ²⁾, Prilitwo B Riski Fangohoi ³⁾,
Reza Muhammad Ramadhan ⁴⁾, Rizkia Yolanda Supriadi ⁵⁾

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: albertchristian.id@gmail.com, Telp: +6282214253650

Abstrak

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan dari sebuah pemekaran daerah. Sebagai daerah pemekaran yang baru, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memprioritaskan pada peningkatan ekonomi dan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dapat dilihat melalui Visi yang diusung oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat saat ini yakni Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius. Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan. Kebijakan Bandung Barat Ca'ang dalam hal ini mengandung pengertian bahwa proses dan hasil pembangunan akan menjamin tersedianya akses keterbukaan isolasi bagi seluruh masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari kebijakan Bandung Barat Ca'ang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan mengenai capaian dari Kebijakan Bandung Barat Ca'ang Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Visi AKUR, Bandung Barat Ca'ang, Pembangunan Manusia, Pendidikan.

Abstract

West Bandung Regency is The Regency on West Java Province is resulting from some expansion area. As new expansion area, the government of West Bandung Regency prioritize for economic development dan human development in West Bandung Regency. It look through the Vision of Regent of West Bandung Regency that is Aspiratioal, Creative, Winning, and Religious. The Implementation policy is the way to reach the goals of policy. That's way will be transformed with policy programs. The mean of Bandung Barat Ca'ang is about process and result of development will availability guarantee access for isolation discloser for all citizen to economic resources, social resources, culture resources. The goals of this research is knowing of accomplishment for Bandung Barat Ca'ang policy with qualitative method. Qualitative method is performed with interview to subject research. The results of research will be showed about accomplishment from Bandung Barat Ca'ang policy on Education sector in West Bandung Regency.

Keywords: The Implementation Policy, AKUR, Bandung Barat Ca'ang, Human Development, Education Sector.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pembangunan dan pengelolaan jalan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna. Kualitas jalan yang baik akan memberikan standar pelayanan minimal dalam penggunaannya, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan penca- paian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.

Terkait dengan fungsi jalan, tujuan politik dan tujuan administratif mengharuskan pemerintah daerah menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan pembangunan jalan, pelibatan masyarakat dalam pembangunan jalan, responsif terhadap pelimpahan kewenangan dari pusat, serta tuntutan profesionalitas dan manajemen pengelolaan jalan.

Peneliti menggunakan teori *George C. Edward III* (1980:10) ada 4 variabel - yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan birokratik.

Pertama komunikasi, Ketika suatu kebijakan akan diimplementasikan, maka hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.

Kedua Sumber daya, selain adanya instrumen yuridis, materiil, personil atau kepegawaian terkait sumberdaya manusia (SDM) dan juga instrumen keuangan atau pembiayaan yang mana merupakan instrumen yang harus ada. Kesiapan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap sisi integritas, moral, budaya atau kesadaran untuk melayani, serta kemampuan (*skill*), merupakan hal yang mutlak. Sebagus apapun suatu peraturan tanpa didukung adanya sumber daya manusia (SDM) serta sarana prasarana yang memadai, maka mustahil bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga sikap, Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Selain itu, dalam rangka implementasi kebijakan tetap perlu memperhatikan sikap masyarakat yang dimana sebagai objek pembangunan tersebut.

Keempat birokratik, yang terfragmentasi menyebabkan meningkatnya kemungkinan gagalnya komunikasi. Beberapa orang yang menerima instruksi dalam proses implementasi, punya kesempatan yang lebih besar beritanya akan terganggu. Jelasnya, fragmentasi membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan tersedia dalam suatu yuridiksi tertentu akibat lebih lanjut akan terjadi ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya. Fragmentasi struktur birokrasi mempengaruhi disposisi dalam proses implementasi.

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan dari sebuah pemekaran Kabupaten Bandung yang diresmikan pada tahun 2007 berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Sebagai daerah pemekaran yang baru, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memprioritaskan pada peningkatan ekonomi dan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dapat dilihat hingga saat ini melalui Visi yang diusung oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat saat ini yakni Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius.

Melalui Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membuat suatu unsur pembentuknya dalam mencapai Visi tersebut, salah satunya ialah melalui Bandung Barat Ca'ang.

Dalam bahasa Sunda, Ca'ang memiliki arti terang atau bercahaya. Namun dalam pengertian Bandung Barat Ca'ang ini memiliki pengertian yang lebih luas. Ca'ang dalam hal ini mengandung pengertian bahwa proses dan hasil pembangunan akan menjamin tersedianya akses keterbukaan isolasi bagi seluruh masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan sumber daya manusia menjadi konsentrasi dalam unsur pembentuk visi Kabupaten Bandung Barat. Secara teoritis, pembangunan atau

perkembangan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam salah satu pembangunan sumber daya manusia, hal terpenting yang dapat membuat sumber daya manusia yang memiliki kualitas mumpuni adalah dengan pendidikan. Pendidikan adalah senjata, senjata yang sanggup memusnahkan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang ada.

Namun dalam praktiknya, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan masih menemukan kendala-kendalanya, seperti halnya yang dialami oleh Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan utama Pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Pengembangan kurikulum ditingkat sekolah cenderung stagnan dan kurang inovasi;
2. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
3. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat untuk belajar masih kurang;
4. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
5. Lingkungan yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan,

- penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
6. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
 7. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun, belum sesuai harapan;
 8. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sekolah hijau dan sekolah sehat belum dikembangkan dengan baik;
 9. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan Bandung Barat masih perlu ditingkatkan mutunya;
 10. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
 11. Pemerataan guru untuk semua jenjang belum tertata;
 12. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai harapan;
 13. Pendidikan karakter belum diimplementasikan sesuai harapan;
 14. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
 15. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan Kabupaten Bandung Barat masih perlu ditingkatkan mutunya. (RPJMD Kabupaten Bandung Barat, 2013, p.173)
- Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di atas, peneliti berharap hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan semoga memiliki kegunaan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun kegunaan yang bersifat praktis, yaitu: Guna teoritis hasil dari penelitian yang sudah diselesaikan diharapkan memberikan masukan atau saran untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan khususnya yang terkait dengan peningkatan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat; dan guna praktis yang semoga dengan penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat, bagi lembaga Pendidikan, dan bagi stake holder lainnya yang membutuhkan.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Jenis penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perencanaan pelaksanaan penelitian dengan cara memilih data, mengumpulkan data yang diteliti pada waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menilai seberapa baik implementasi kebijakan yang diberikan kepada masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena objek yang diteliti oleh peneliti bukanlah objek berbentuk angka, melainkan penelitian ini dilakukan berdasarkan menggunakan penalaran dengan peneliti sebagai instrumen. penelitiannya menggunakan panca indera yang dimiliki dan menuliskan hasil penelitiannya kedalam naskah penelitian mengenai Implementasi Kebijakan *KBB Ca'ang* oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mendeskripsikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan fakta-fakta yang ada dan berhubungan dengan Implementasi Kebijakan *KBB Ca'ang* oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Komp. Pemkab Jl. Padalarang-Cisarua Km.2, Mekarsari, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Kamis, 9 Mei 2019.

Target/Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah teknik purposive sampling.

Teknik penentuan subjek secara *Purposive* adalah teknik pengambilan contoh data dengan pertimbangan tertentu, dimana orang yang di wawancarai di anggap sebagai orang yang paling tahu tentang apa yang kita inginkan, sehingga dapat memudahkan peneliti mengenai objek dari penelitian. Adapun Informan dalam yang di ambil dalam penelitian ini dipilih berdasarkan:

1. Pengetahuan yang dimiliki oleh informan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti ambil.
2. Informan penting yang mempunyai informasi yang luas mengenai d.
3. Masyarakat selaku subjek dan objek pembangunan yang di anggap sebagai informan yang merasakan dan dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
4. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam

menentukan informan masyarakat adalah teknik Accidental, yaitu peneliti memilih siapa saja yang secara acak atau kebetulan ditemui dan dianggap cocok sebagai sumber data (Prasetyo, 2010:123). Adapun Peneliti memilih aparatur Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

Prosedur

Menurut Anggoro (2007: 6.18) penelitian kualitatif memulai kegiatan penelitiannya dengan suatu fokus, pertanyaan, permasalahan, maupun teknik pengumpulan data tertentu yang dapat diantisipasi, pada kenyataannya selalu berubah sesuai dengan umpan balik yang diperoleh di lapangan. Oleh sebab itu, proses analisis pada penelitian kualitatif ini sering dianggap lebih sebagai suatu seni daripada suatu ilmu.

Dengan metode penelitian kualitatif ini, peneliti ingin memberikan penjelasan mengenai Implementasi Kebijakan Bandung Barat Ca'ang bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang peneliti dapat yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah diantaranya:

- Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023. Data ini didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.

- Unsur pembentuk dari Visi AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul, dan Religius). Data ini didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- Rincian Misi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023. Data ini didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- Rincian Program Prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023. Data ini didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- Data jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat hingga tahun 2018
- Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-18 Tahun di Kabupaten Bandung Barat hingga tahun 2018.
- Angka Melek Huruf di Kabupaten Bandung Barat hingga tahun 2017.
- Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Barat hingga tahun 2017.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang penting dalam menggunakan suatu metode penelitian untuk mencari sumber data yang

mendukung penelitian dan mengetahui ilmu - ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti ambil. Yang kemudian di buat kesimpulannya.

Cara yang digunakan adalah dengan mencari data-data pendukung pada berbagai literatur baik berupa buku, makalah-makalah, jurnal dan beberapa hasil - hasil penelitian sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian tentang Implementasi Kebijakan KBB Ca'ang oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan di lapangan, dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan

mengenai Implementasi Kebijakan KBB Ca'ang oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

b) Wawancara

Wawancara merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Dengan melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar isu yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan terstruktur. Wawancara terbagi menjadi dua cara yang pertama wawancara langsung kepada narasumber dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan alat wawancara seperti : kamera, buku catatan, pulpen dan perekam, dan wawancara tidak langsung yaitu menggunakan alat bantu berupa telephone atau handphone dengan menggunakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan wawancara seperti : *Whatsapp, Line dan Gmail.*

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengumpulan data dan mencatat suatu hal yang penting, berupa catatan tertulis atau berupa gambar ,dan hal-hal yang dianggap penting ketika

melakukan penelitian di lapangan.

Teknik Analisis Data

Setelah semua data sudah di kumpulkan dan di uji keabsahannya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data yang di dapat di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat. Teknik analisa data digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam sebuah penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik metode deskriptif kualitatif. Yaitu analisis dimana peneliti menggunakan data yang sudah ada kemudian menyaring kembali data yang ada dan mencari hubungan yang terjadi, persamaan, dan makna yang dianggap penting terkait dengan Implementasi Kebijakan *KBB Ca'ang* oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sehingga data yang sudah terkumpul dan di anggap benar dapat di presentasikan sesuai dengan data yang di peroleh ketika melakukan observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut dapat di *publish* kepada masyarakat luas.

Hasil pengumpulan data yang sudah terkumpul kemudian di kelompokkan berdasarkan jenisnya. Analisis data dilakukan berdasarkan temuan data pada saat observasi. Kemudian hasil dari analisis tersebut disimpulkan. Sehingga peneliti dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan

fenomena yang terjadi dalam penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Reduksi data.

Reduksi data sebagai pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data faktual mengenai Implementasi Kebijakan *KBB Ca'ang* oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyaring data-data yang dianggap penting tentang kualitas pemerintah untuk diolah lebih sistematis sehingga dapat dianalisa langsung pada pokok permasalahan. Data-data tersebut hasil dari proses observasi di lapangan serta wawancara dengan para informan mengenai Implementasi Kebijakan *KBB Ca'ang* oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penyajian data ini dilakukan peneliti untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami mengenai Implementasi Kebijakan *KBB Ca'ang* oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu lebih kepada kerangka berfikir peneliti dalam permasalahan

mengenai Implementasi Kebijakan *KBB Ca'ang* oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data-data yang faktual dan analisa peneliti berdasarkan data-data di lapangan untuk ditarik kesimpulan. Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu, data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Pembangunan

Untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan agar permasalahan dengan kebijakan dapat terpecahkan, maka untuk memecahkannya kita perlu memahami beberapa paradigma pembangunan yang terdiri dari:

a. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan paradigma yang paling banyak digunakan sebagai identitas pembangunan oleh negara-negara di dunia. Keberhasilan di sektor ekonomi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu pembangunan. Suatu pembangunan ekonomi jika disederhanakan

merupakan proses yang menggambarkan kenaikan pendapatan *riil* per kapita dari penduduk di negara tersebut pada jangka panjang yang disertai dengan pembaruan/penyesuaian sistem kelembagaan ekonomi.

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi ini umumnya ditandai dengan : (1) peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, (2) perkembangan produk domestik bruto (PDB)/produk nasional bruto (PNB) yang terjadi dalam suatu daerah/negara bersamaan dengan perombakan dan modernisasi struktur ekonomi.

Di era *keynesian*/sistem ekonomi campuran seperti saat ini, keberhasilan pembangunan ekonomi kerap dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi tanpa memandang jumlah kenaikan pertumbuhan tersebut dari tingkat pertumbuhan penduduk dan terjadi perubahan pada struktur ekonomi pada negara tersebut.

b. Pembangunan Sosial

Keberhasilan suatu pembangunan juga harus dilihat dari sisi pemerataan ekonomi masyarakat. Berbagai fakta empiris menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan akan meningkatkan risiko instabilitas politik, sehingga perlu dilakukan perbaikan struktur ekonomi yang menyertakan faktor sosial kemasyarakatan sebagai bagian inklusif dalam pembangunan nasional. Hubungan yang saling berkaitan

antara faktor ekonomi dengan faktor non-ekonomi dalam sebuah sistem sosial perlu dipandang sebagai penguat pasar dan bukan sebaliknya.

Pemerintah sebagai “wasit yang adil” harus dapat memosisikan keadilan pasar dan keadilan sosial secara seimbang kepada masyarakat dengan tidak campur tangan terlalu jauh terhadap mekanisme pertumbuhan pasar sehingga dapat mencederai sisi keadilan sosial. Dengan kata lain, masyarakat harus memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan daya beli dan keterampilannya untuk mengolah serta memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya.

Mengacu pada pemahaman tersebut, lahirlah istilah yang dinamakan dengan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang lebih memfokuskan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melainkan untuk mendorong adanya keberimbangan kesempatan antara pemodal besar dengan pemodal kecil. Oleh karena itu, diharapkan pemodal besar yang telah hadir di pasar luar negeri diharapkan mampu membina, mendorong dan mengajak UMKM untuk menjadi pemain pasar global sehingga dapat terwujudlah pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi.

c. Pembangunan Yang Berpusat Pada Rakyat

Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat ini merupakan

sebuah konsep yang memandang inisiatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama. Model pembangunan ini menurut Korten dalam Tjokrominoto lebih menekankan pada penguatan diri masyarakat yang berdasarkan asas partisipasi dan keadilan sosial untuk melewati segala kesulitan dalam fase-fase pembangunan sehingga hasil yang diperoleh dapat dimaksimalkan dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

Dengan menggunakan skala waktu, pendekatan pembangunan ini dipraktikkan dalam kebijakan jangka panjang yang diterapkan untuk menekan ketimpangan kelas sosial dan mengarahkannya menuju keadilan sosial dalam kondisi egalitarian/harus disamakan dalam semangat gotong royong dan persaudaraan. Adapun kebijakan jangka menengah diterapkan untuk mempertahankan penghidupan rakyat, mengatasi segala permasalahan aktual berkaitan dengan pangan, sandang, papan.

Penggunaan paradigma pertumbuhan dan kesejahteraan telah menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan, dimana telah menghasilkan adanya distorsi atau krisis lingkungan dengan menipisnya daya dukung alami, meningkatnya ketergantungan rakyat yang luar biasa dengan proyek pembangunan atau kepada birokrasi dan menjadi kendala pada pembangunan berkelanjutan (sustained development), di samping partisipasi yang tumbuh lebih

merupakan mobilisasi partisipasi dalam implementasi, bukan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kelemahan-kelemahan dari paradigma tersebut selanjutnya memunculkan paradigma *people centered development*.

Adapun logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia, dengan didukung sumber pembangunan utamanya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak akan pernah habis, dengan tujuan utamanya adalah perkembangan manusia dengan aktualisasi yang optimal dari potensi manusia.

“Paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, dan menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri.” (Korten dalam Tjokrowinoto, 1999:217).

“Kemudian manajemen pembangunannya mengubah peranan birokrasi pemerintah dari merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk rakyat, berubah menjadi aktor dalam menciptakan kondisi yang menimbulkan kemandirian rakyat atau dengan kata lain, sebagai katalis dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat kepada kemandirian lokal.” (Korten dalam Tjokrowinoto, 1999:214)

Pembangunan yang berorientasi dengan menempatkan rakyat sebagai

aktor utama, yang memiliki kekuatan di dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, dalam mewujudkan keterkaitan (interlinkages) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan kultur dengan melihat saat ini dan di masa datang, tentunya dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat yang menekankan multi sektoral, dengan mengedepankan partisipasi lokal dan perencanaan dari bawah dan keadilan sosial.

Hal ini merupakan model pembangunan yang tepat untuk dilaksanakan seiring dengan semakin kuatnya tuntutan daerah akan otonomi yang luas

d. Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan sejatinya harus dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Mengacu pada program lingkungan hidup manusia yang dideklarasikan di Stockholm, Swedia, menyatakan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan tujuan keseimbangan alam dan tidak boleh digunakan untuk eksploitasi semena-mena sehingga dapat membahayakan keberlangsungan hidup berbagai varian ekosistem dan hal-hal lain yang terkait dengan lingkungan.

Dalam hal ini, Indonesia telah memulai pembangunan ini sejak

REPELITA II (1979-1983) dan sejak saat itu, pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H UUD 1945, yang menyatakan bahwa pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem kebijakan nasional yang terpadu berupa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal).

e. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan wajib dilaksanakan selain harus berwawasan lingkungan juga harus berkelanjutan demi kelangsungan hidup sekarang dan generasi masa yang akan mendatang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan fokus utama dari pembangunan berkelanjutan ini ialah masyarakat, sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Keterkaitan antara aspek ekonomi dan aspek sosial dapat menciptakan pembangunan yang adil dan terus berjalan, sementara hubungan antara aspek sosial dengan aspek lingkungan menjadikan pembangunan dapat terus bertahan, dan ketika ketiga aspek

tersebut berjalan beriringan dapat menciptakan kondisi pembangunan yang berkelanjutan.

Pada saat ini, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menghadapi suatu tantangan, diantaranya ialah ketidakberdayaan dalam menemukan suatu cara untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan tanpa saling mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan adanya penyusunan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan melalui paradigma pembangunan global yang tercantum dalam strategi Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah kerangka kerja pembangunan untuk 15 tahun ke depan yang menggarisbawahi sisi positif dari globalisasi, yang di dalamnya terdapat tiga indikator utama, yaitu :

- A. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia, diantaranya pendidikan dan kesehatan.
- B. Indikator yang melekat pada pembangunan ekonomi sosial, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana sosial serta pertumbuhan ekonomi.
- C. Indikator yang melekat pada pembangunan lingkungan, berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Pembangunan

Pembangunan adalah kebutuhan rakyat untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan sebuah simbol bertemunya antara kepentingan rakyat yang membentuk negara dengan pemerintah yang diberi amanat untuk mengelola negara. Di satu sisi, sejahtera merupakan visi atau misi sejati kehidupan manusia. Dalam tata nilai paling mendasar sejarah peradaban mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kondisi sejahtera, lahir, batin dan dunia akhirat. Selain itu, penyelenggaraan negara oleh pemerintah adalah mengelola sumber daya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, sejahtera bisa digambarkan sebagai sebuah "rasa" baik sendiri maupun kelompok dan juga mewakili suatu keadaan. Sebagai rasa maupun keadaan yang sejajar pada tujuan, maka sejahtera merupakan upaya kedua pihak yaitu rakyat dan negara untuk bersama mewujudkannya. Begitu pentingnya, kesejahteraan menjadi salah satu masalah paling mendasar tentang hubungan jatuh bangunnya suatu kekuasaan, bangsa dan negara.

Pada dasarnya dalam pembangunan terdapat dua pilar utama yang saling berkaitan, yaitu negara dan rakyat. Negara merupakan penyelenggara pembangunan melalui organ pemerintahan dan rakyat adalah tujuan sekaligus subjek dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal tersebut membuat Pemerintah selaku penyelenggara harus menguasai tata kelola pembangunan agar kebijakan

publik yang ditetapkan dapat menjadi nilai tambah. Dengan demikian, pembangunan harus berkorelasi langsung dengan tata kehidupan masyarakat yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan paling penting dalam suatu kebijakan publik, karena berhasil tidaknya suatu kebijakan terletak bagaimana aktor-aktor kebijakan publik melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan, apakah aktor kebijakan publik mengimplementasikan suatu kebijakan dengan optimal atau tidak dapat dilihat dari hasilnya. Berdasarkan pada definisi di atas bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahap implementasi kebijakan kita dapat mengetahui berhasil tidaknya suatu kebijakan dilihat dari hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Keban (2004: 55) bahwa "*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja". Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
2. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.

3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas intelektual meliputi perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. (Aneta, Publik, & Publik, 2010)

Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut VanMetter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa:

"Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan."

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196) menjelaskan bahwa:

"Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya."

Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan diatas, Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho mengatakan bahwa;

”Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.”(Nugroho, 2003:158)

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa dalam proses mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yaitu, langsung mengimplemntasikan dari bentuk program program atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat jalur birokrasi, melainkan lebih dari menyangkut masalah konflik, keputusan dan dampak yang akan timbul jika suatu kebijakan diimplementasikan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila implementasi kebijakan dilaksanakan dengan maksimal.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Model-model Implementasi Kebijakan

1. Model George Edwards III
Edwards III (1980:1)
mengemukakan:

“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?” Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edwards III (1980: 10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni: *“Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure”*.

Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat factor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tdak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

2. Model Meter dan Horn

Model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99), menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.

- b. Karakteristik dan agen pelaksana/ implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan. (Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010)

3. Model Mazmanian dan Sabatier

Model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho, 2006: 129) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

- a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki
- b. Variabel *intervening*, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang

mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

- c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

4. Model Hoogwood & Gun

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2006) mengetengahkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- a. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.

- c. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

5. Model Merilee S. Grindle

Model Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134) ditentukan oleh "isi kebijakan dan konteks implementasinya". (Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik,

Volume 1 No. 1 Thn. 2010) Dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.

Dalam model *Grindle* tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Pelaksana program, dan
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

6. Model Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter
Model implementasi kebijakan yang disusun oleh Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern & David O'Porter (dalam Nugroho, 2006:134) bahwa "Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat didalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang dimiliki". Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan

pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

7. Model Jan Merse

Jan Merse (dalam Koryati, 2004:16) mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Informasi
- b. Isi kebijakan
- c. Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan
- d. Pembagian potensi.

Khusus dukungan masyarakat, berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program. Penegasan di atas membuktikan bahwa setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder*.

8. Model Warwic

Warwic (dalam Subarsono, 2005:99) mengatakan bahwa “Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. kemampuan organisasi,
- b. informasi,
- c. dukungan, dan

d. pembagian potensi”.

9. Model Rippley dan Franklin

Menurut Rippley dan Franklin (Subarsono, 2005:99) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu:

- a. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan
- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

10. Model Charles Jones

Charles Jones (dalam Ricky Istamto, 1999: 296) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

Memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

11. Model Goggin, Brown, dkk.

Goggin, Brown, dkk. (1990) dalam bukunya *Implementation Theory and Practice Toward a Third Generation*, secara implicit mensyaratkan 3 hal penting dalam implementasi kebijakan, yakni:

- a. isi pesan,
- b. bentuk pesan,
- c. persepsi mengenai pimpinan negara.

12. Model MSN-Approach (Model YK)

Tidak sedikit para ahli telah mengemukakan tentang berbagai model implementasi kebijakan publik, dan dari kajian terhadap berbagai model tersebut, maka penulis dapat menawarkan model atau formula hasil dari pengembangan model implementasi kebijakan yang juga disadari belum sepenuhnya mengakomodir substansi dari kehendak sebuah teori dengan aplikasi empirik, tetapi paling tidak Kadji (2008: 59-68) dapat menyumbangkan hasil pemikiran akademik dalam tataran kepentingan pengembangan teori atau formula model implementasi kebijakan publik melalui pendekatan *mentality, systems, and networking* atau oleh penulis disebut model implementasi kebijakan melalui MSN-Approach.

Pemikiran pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *policy of stakeholders*,

yaitu: *government, private sector, dan civil society*. (Aneta, Publik, & Publik, 2010)

Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-ciri yang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Abidin (2004: 62-63), bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias. Dalam pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kepastian dalam pelaksanaan sesuatu kebijakan yang siap diimplementasikan.
2. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.
3. Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan.
4. Rumusan kebijakan yang jelas. (Aneta, Publik, & Publik, 2010)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki sumber daya yang cukup banyak dengan melibatkan berbagai stakeholders dengan membentuk simpul atau jaringan aspirasi di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terakomodir dalam perencanaan pembangunan selanjutnya

Proses mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yaitu, langsung mengimplemntasikan dari bentuk program-program atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Subarsono dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Hubungan antar organisasi Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumber daya organisasi

Sumber daya organisasi untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non human resources).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

(Subarsono, 2006:101)

Faktor-faktor diatas menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dapat berhasil apabila terdapat faktor-faktor tersebut dengan memberi fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan.

Manfaat Kebijakan

Adapun Manfaat dari kebijakan public dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi, dapat membentuk masyarakat hukum, dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak. menurut Ndraha (1990 :104) yaitu: Dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatkan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipatif harus dilakukan dengan usaha: (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior).

Menurut Munandar (2011:5), yang menyatakan bahwa :“Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning) masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana”. masyarakat itu aktif sebagai subyek dalam pembangunan atau tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh pemerintah saja tetapi berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki sumber daya yang cukup banyak dengan melibatkan berbagai stakeholders dengan

membentuk simpul atau jaringan aspirasi di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terakomodir dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, Callahan (2016 : 4) menyebut bahwa fokus dari mekanisme akuntabilitas bukan lagi secara administratif atau birokratis, melainkan berfokus pada stakeholders dan norma-norma profesionalitas. Sebab, dengan multi stakeholders, implementasi membutuhkan jejaring yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga, atau kerap diistilahkan sebagai administrative networks. Jejaring tersebut mampu menjadi kuat apabila arus informasi, keterbukaan dan kesepahaman mampu diraih oleh masing-masing aktor, tanpa kecuali. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pun harus melakukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan Bandung Barat Ca'ang telah dilaksanakan selama kurang lebih 1 Tahun di Kabupaten Bandung Barat. Berbagai tanggapan muncul menanggapi program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat sebagai akibat dilaksanakannya otonomi daerah cukup signifikan, hal ini terlihat dari capaian, target atau sasaran yang sudah cukup terpenuhi walaupun masih harus ada perbaikan atau penyempurnaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, Anggaran Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat dianggarkan sejumlah 20% dari APBD.

Hal tersebut dapat dilihat melalui data jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

JENJANG	NEGERI	SWASTA
SD/Sederajat	674	23
SMP/Sederajat	65	99
SMA/Sederajat	16	39
SMK/Sederajat	8	85

Sumber : Kabupaten Barat Dalam Angka 2018

Hal tersebut berpengaruh terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bandung Barat.

Hal tersebut dapat dilihat melalui data Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-18 Tahun di Kabupaten Bandung Barat.

USIA	Angka Partisipasi Sekolah
5-6	-
7-12	99,65
13-15	90,28
16-18	57,74

Sumber : Kabupaten Barat Dalam Angka 2017

Selain pencapaian diatas, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pencapaian pada tahun sebelumnya.

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
5-6	22.34	19.72
7-12	99.31	100
13-15	90.11	96.13
16-18	59.93	60.94

Sumber : Kabupaten Barat Dalam Angka 2018

Melalui data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah dari Tahun 2015-2018.

Hal tersebut berpengaruh terhadap Angka Melek Huruf di Kabupaten Bandung Barat.

GENDER	HURUF LATIN	HURUF ARAB	HURUF LAIN	BUTA HURUF
Laki-Laki	100	37,37	1,67	-
Perempuan	100	38,94	3,96	-

Sumber : Kabupaten Barat Dalam Angka 2018

Hal tersebut berpengaruh terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Barat.

TAHUN	IPM
2010	61.34
2011	62.36
2012	63.17
2013	63.93
2014	64.27
2015	65.23
2016	65.81
2017	66.63

Sumber : ipm.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pembangunan dari berbagai sektor yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus meningkat pada setiap tahunnya.

Namun dalam hal ini, pencapaian IPM dari Kabupaten Bandung Barat masih lebih kecil dari Kabupaten Purwakarta yang berjumlah 66,93 dan Kabupaten Karawang berjumlah 69,17.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki sumber daya yang cukup banyak dengan melibatkan berbagai stakeholders dengan membentuk simpul atau jaringan aspirasi di berbagai wilayah di Kabupaten

Bandung Barat sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terakomodir dalam perencanaan pembangunan.

Proses mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yaitu, langsung mengimplemntasikan dari bentuk program-program atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan

Faktor-faktor yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dapat berhasil apabila terdapat faktor-faktor tersebut dengan memberi fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan Bandung Barat Ca'ang yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 1 Tahun di Kabupaten Bandung Barat. Berbagai tanggapan muncul menanggapi program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat sebagai akibat dilaksanakannya otonomi daerah cukup signifikan, hal ini terlihat dari capaian, target atau sasaran yang sudah cukup terpenuhi walaupun masih harus ada perbaikan atau penyempurnaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Saran

Peneliti berharap pada penelitian selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

a. Dari Buku:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat (2017). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2017*. Kabupaten Bandung Barat: CV. Nugraha.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat (2018). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2018*. Kabupaten Bandung Barat: CV. Nugraha.

b. Dari Jurnal:

Lamblenova, Rossy (2007). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang

Pendidikan, Kesehatan, Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, 19 (2), 185-198.

Aneta, A., Publik, J. A., & Publik, J. A. (2010). *Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota gorontalo asna aneta*. 1(1).

g. Dari Internet

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 Retrieved from <http://bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id/index.php/login>